

TAJUK RENCANA

Dampak Penerapan PPN 12 Persen

PEMERINTAH akan menerapkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2025. Namun hingga sekarang belum ada aturan turunan yang merincikan pengenaan PPN 12 persen tersebut. Wajar bila kemudian muncul reaksi penolakan dari masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Mengapa? Dalam kondisi seperti sekarang ini saja kehidupan ekonomi masyarakat masih belum stabil, apalagi PPN dinaikkan menjadi 12 persen. Diperkirakan dalam waktu dekat ini sudah ada aturan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Kita sangat memahami bahwa kebijakan PPN 12 persen merupakan bagian dari reformasi perpajakan nasional sebagaimana diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pemerintah meyakini langkah ini akan menjaga keseimbangan fiskal di tengah tantangan ekonomi global. Dengan kenaikan PPH, pemerintah optimis akan menaikkan penerimaan negara secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat perekonomian nasional.

Secara ideal memang demikian, namun secara realitas belum tentu. Siapa yang menjamin bahwa penerimaan negara, khususnya dari penerimaan PPN 12 persen tidak akan bocor (baca: dikorupsi)? Pun, benarkah penerimaan PPN 12 persen digunakan secara efektif untuk pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat?

Mengacu pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini, kebijakan PPN 12 persen bersifat selektif dan hanya menyasar barang dan jasa kategori mewah dan premium. Sekadar contoh, di bidang kesehatan, layanan kesehatan yang terkena PPN 12 persen adalah kategori premium atau VIP. Juga dalam hal barang kebutuhan pokok yang terkena PPN 12 persen berkategori premium, misal beras premium, ikan premium, daging

premium dan sebagainya.

Bagaimanapun, pengenaan PPN 12 persen akan menambah beban konsumen, karena barang dan jasa menjadi lebih mahal. Ini akan terasa bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun untuk bahan kebutuhan pokok dikecualikan dari pengenaan PPN 12 persen, namun kenaikan harga barang dan jasa ini tetap akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Mengapa? Karena produsen akan cenderung membebankan tambahan biaya pajak kepada konsumen, melalui peningkatan harga barang.

Akibat selanjutnya dapat ditebak, tingkat inflasi akan naik yang notabene akan megerus nilai uang masyarakat. Hal ini akan dirasakan terutama kalangan rentan yang selama ini sudah kesulitan menghadapi kenaikan biaya hidup. Belum lagi kalangan dunia usaha, khususnya UMKM juga akan terdampak atas kebijakan PPN 12 persen. Biaya operasional menjadi naik, sehingga akan melemahkan daya saing mereka.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian serius adalah soal pemerataan dalam penarikan pajak. Seperti diketahui, sebagian besar beban PPN ditanggung oleh masyarakat umum, sedangkan pajak penghasilan atau PPh yang ditujukan untuk kelompok berpenghasilan tinggi penerapannya sering tidak optimal, karena memanfaatkan celah kelemahan sistem perpajakan.

Berkenaan hal itu, kita menginginkan pemerintah memberi subsidi kepada kelompok rentan, baik secara langsung atau lewat bantuan sosial, khususnya kepada masyarakat berpenghasilan rendah guna mengurangi dampak kenaikan harga barang dan jasa. Selain itu, kita juga mendorong transparansi dalam pengelolaan penerimaan pajak, memastikan bahwa penerimaan PPN digunakan secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat. □ - x

Bela Negara dan Peran Museum di DIY

Yustinus Suranto

klithih, tawuran sosial, korupsi, kolusi dan nepotisme menandakannya.

Diperlukan dua upaya mengatasinya. Pertama, penguatan pendidikan bela negara. Kedua, menghidupkan semangat nasionalisme inklusif. Untuk itu, perlu dipererat kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan formal maupun non-formal, termasuk lembaga permuseuman.

Peran Museum di DIY

Berdasar PP nomor 66 tahun 2015, museum mengemban tujuh peran uta-



KR-JOKO SANTOSO

ma, yakni: Pelestarian Warisan Budaya, Pusat Riset, Sarana Wisata Budaya, Peningkatan Identitas Lokal, Tempat Pameran Seni, Memperkenalkan Keragaman Budaya Indonesia dan Pendidikan. Dalam konteks pendidikan, museum berperan sebagai pusat pendidikan non-formal tentang sejarah, seni, budaya, tradisi lokal, perjuangan dan bela negara bagi publik dan pengunjung pelajar. mahasiswa generasi muda. Program Pendidikan dirancang dan dilaksanakan bersuasanakan rekreatif.

Dalam konteks permuseuman, DIY merupakan daerah istimewa berdasar tiga alasan. Pertama, DIY merupakan tempat kelahiran asosiasi permuseuman pertama di Indonesia, yakni Barahmus. Kedua, DIY menempati urutan tertinggi dalam hal kepadatan museum. Jumlah museum per satuan luas wilayah merupakan yang terpadat dibanding provinsi lainnya. Terdapat museum sejumlah 86 unit di DIY, 41 unit di antaranya anggota Barahmus.

Sangat banyak jumlah Calon Museum berproses menjadi museum. Ketiga, DIY memiliki jumlah terbanyak museum universitas anggota Jaringan Museum Perguruan Tinggi Indonesia. Yogyakarta sangat layak berpredikat Kota Museum. *Jogja City of Museum*. Predikat ini menambah predikat Kota Yogyakarta, sebagai kota: kebudayaan, perjuangan, pendidikan, pariwisata, dan filosofi.

Museum di DIY kelompokkan empat rumpun, yakni museum bertema: ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, seni dan budaya, serta sejarah dan perjuangan. Setiap kelompok museum dapat melakukan pendidikan bela negara. Meski demikian, museum bertemakan sejarah dan perjuanganlah paling berkompeten.

Ada sepuluh museum anggota Barahmus yang berkompeten, yakni museum: TNIAD Dharma Wiratama, TNI AU Dirgantara Mandala, Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman, Benteng Vredeburg, Monumen Jogja Kembali, Perjuangan, Sandi, Monumen Pengeran Diponegoro Sasana Wiratama. Memorial Jenderal Besar Soeharto, Monumen Pahlawan Pancasila, serta Bahari.

Museum-museum ini meningkatkan program pendidikan publik bagi peningkatan kualitas bela negara sehingga setiap warga negara dapat memahami peran dan aktualitasnya membangun Indonesia. Marilah merayakan Hari Bela Negara dan meningkatkan kadar bela negara demi mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan NKRI. (*)-d

**)Dr Ir Yustinus Suranto MP, Pengurus Bidang Komunikasi, Informasi dan Dokumentasi, Badan Musyawarah Musea DIY.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kualitas Hidup Manusia di DIY Sangat Tinggi

Indyah Kusumaningrum

KUALITAS hidup manusia di DIY sudah memasuki kategori sangat tinggi. Rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) periode 2021-2024 telah mencapai angka di atas 80. Pada tahun 2024, IPM DIY sebesar 81,62, peringkat tertinggi di Indonesia di bawah DKI Jakarta sebesar 84,15. Angka IPM DIY ini tumbuh sebesar 0,65 persen dibanding tahun 2023 sebesar 81,09. Jika dibanding pertumbuhan rata-rata selama 2020-2023 sebesar 0,52 persen, maka pertumbuhan IPM setahun terakhir mengalami pertumbuhan yang jauh lebih tinggi. Artinya, angka IPM tersebut tumbuh lebih cepat walau dengan kategori yang sangat tinggi. Gambaran ini menunjukkan terjadi akselerasi dalam pembangunan kualitas manusia di DIY.

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Dimensi umur panjang dan hidup sehat telah mencapai kondisi yang sangat baik. Hal ini dijelaskan oleh umur harapan hidup (UHH) yang telah mencapai 75,36 tahun. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2024 diperkirakan akan hidup sampai mencapai umur 75 atau 76 tahun. UHH tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 0,24 persen dibanding tahun 2023 yang sebesar 75,18. Dibanding pertumbuhan rata-rata UHH periode 2020-2023 yang mencapai 0,10 persen per tahun, pertumbuhan ini jauh lebih tinggi (hampir dua kali lipat). Tingginya pertumbuhan UHH sebagai komponen penyusun IPM sangat berpengaruh terhadap tingginya pertumbuhan angka IPM. Indikasi ini menunjukkan pembangunan kesehatan memberikan dampak perbaikan yang signifikan terhadap kualitas umur dan kesehatan masyarakat.

Dimensi Pengetahuan

Dari aspek dimensi pengetahuan, DIY juga mengalami perbaikan cukup signifikan. Ini terlihat dari kenaikan pada dua indikator yang menjadi

penyusunnya, yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). HLS pada tahun 2024 telah mencapai 15,70 yang artinya rata-rata penduduk 7 tahun ke atas diperkirakan akan menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang D3 atau D4. Selain itu, pertumbuhan HLS setahun terakhir masih tinggi sebesar 0,26 persen dibanding tahun 2023 yang sebesar 15,66. Angka pertumbuhan ini juga lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan periode 2020-2023 sebesar 0,15 persen.

Indikator kedua dari dimensi pengetahuan adalah rata-rata lama sekolah (RLS). Capaian RLS pada tahun 2024 adalah sebesar 9,92 yang artinya penduduk umur 25 tahun ke atas rata-rata memiliki tingkat pendidikan hampir selesai kelas 10 sekolah menengah lanjutan atas (SLTA). Angka ini lebih tinggi dibanding tahun 2023 mencapai 9,83 atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,91 persen. Namun, angka pertumbuhan ini di bawah rata-rata pertumbuhan selama 2020-2023 sebesar 0,97 persen. Kondisi ini menjelaskan bahwa pembangunan pendidikan di DIY masih cukup efektif dalam meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat.

Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir penyusun IPM adalah standar hidup layak. Indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi ini adalah pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) yang mencapai Rp 15,36 juta pada tahun 2024. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 2,93 persen dibanding tahun 2023 sebesar Rp 14,92 juta. Angka pertumbuhan ini juga juga di atas rata-rata per-

tumbuhan selama 2020-2023 sebesar 2,12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan (daya beli) masyarakat mengalami pertumbuhan yang tinggi selama setahun terakhir.

Dari data tersebut terlihat banyak peluang yang masih terbuka dalam upaya meningkatkan kualitas manusia DIY. Adapun intervensi yang dilakukan dengan meningkatkan nilai indikator komponen penyusun. Pertama, untuk peningkatan UHH bisa dilakukan dengan perbaikan fasilitas kesehatan, mulai dari penambahan fasilitas kesehatan dan memperbaiki pelayanan kesehatan agar terjadi penurunan kematian bayi, kematian ibu, stunting dan lain-lain. Kedua, untuk peningkatan HLS dan RLS dengan meningkatkan perbaikan pelayanan pendidikan agar semua anak umur sekolah bisa mendapatkan pendidikan dan tidak ada lagi anak putus sekolah. Ketiga, perbaikan kesejahteraan bisa dilakukan dengan memperluas lapangan kerja formal dan melakukan pelatihan untuk peningkatan produktifitas pekerja. (*)-d

**)Indyah Kusumaningrum, BPS Kulonprogo.*

Pojok KR

KPK geledah kantor BI terkait korupsi dana CSR.

- Ungkap aktor di belakang layar.

Usulan Pilkada melalui DPRD, Kemen-dagri: tak buru-buru.

- Lama-lama tertutup isu lain.

Kemkomdigi tindak 5,4 juta konten judi online.

- Akun ditutup, muncul akun baru, begitu seterusnya....

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPENS/ISUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSce.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.

Direktur Lithbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.